

**Kalurahan : KARANGWUNI**

**Kapanewon : WATES**

**Kabupaten : KULON PROGO**

**Tahun : 2023**

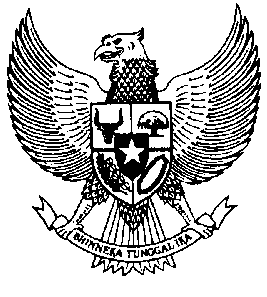
**TENTANG**

PEMERINTAH KABUPATEN

**KULON PROGO**

**NOMOR ..... TAHUN 2023**

**PENATAAN RUANG WILAYAH KALURAHAN**



LURAH KARANGWUNI

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI

NOMOR ……. TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN RUANG WILAYAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGWUNI,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa ruang wilayah Karangwuni yang terdiri dari kawasan administrasi Pemerintahan Kalurahan Karangwuni, baik sebagai kesatuan wilayah yang meliputi ruang darat, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah Kalurahan Karangwuni dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa perkembangan situasi dan kondisi desa dan wilayah binaan menuntut penegakan prinsip keadilan, keserasian, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah kalurahan yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila; 3. bahwa untuk memperkuat Otonomi Kalurahan berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar kawasan dan antar sektor agar tidak menimbulkan kesenjangan; 4. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang wilayah kalurahan yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Kalurahan Karangwuni tentang Penataan Ruang Wilayah Kalurahan Karangwuni |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Situbondo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9); 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31); 11. Peraturan Desa .................. Nomor …… Tahun 20... Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor.....); 12. Peraturan Desa .................. Nomor …… Tahun 20... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor.....); 13. *Peraturan Desa ………….. (yang relevan dan berlaku…)* |
| Dengan Kesepakatan Bersama  BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWUNI  Dan  LURAH KARANGWUNI  MEMUTUSKAN: | | |
| Menetapkankan | : | PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH KALURAHAN |
|  |  | BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :   1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 7. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Kalurahan, dan masyarakat dalam penataan ruang. 8. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan, dan masyarakat. 9. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 10. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 16. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 21. Kawasan agro adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 22. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 23. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 24. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.   BAB II  ASAS DAN TUJUAN  Pasal 2  Dalam kerangka Pemerintahan, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:   1. keadilan; 2. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; 3. keberlanjutan; 4. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 5. keterbukaan; 6. kebersamaan dan kemitraan; 7. pelindungan kepentingan umum; 8. kepastian hukum; dan 9. akuntabilitas.   Pasal 3  Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Desa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Desa dengan:   1. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan 3. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.   BAB III  KLASIFIKASI PENATAAN RUANG  Pasal 4  Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.  Pasal 5   1. Penataan ruang berdasarkan pola ruang/ fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. 2. Penataan ruang berdasarkan struktur ruang dan wilayah administratif Pemerintah Kalurahan. 3. Penataan ruang berdasarkan ruang kawasan perdesaan. 4. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan Perdesaan.   BAB IV  TUGAS DAN WEWENANG  Bagian Kesatu  Tugas  Pasal 6   1. Pemerintahan Kalurahan menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Kalurahan melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan kolaborasi dengan semua Para Pihak Pemerintah Daerah, Investor dan Masyarakat. 3. Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   Bagian Kedua  Wewenang Pemerintahan Kalurahan  Pasal 7   1. Wewenang Pemerintahan Kalurahan dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: 2. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Kalurahan; 3. pelaksanaan penataan ruang wilayah Kalurahan; 4. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kalurahan; danWewenang Pemerintahan Kalurahan dalam pelaksanaan 5. kerjasama penataan ruang antar kalurahan. 6. penataan ruang kalurahan meliputi: 7. perencanaan tata ruang wilayah kalurahan; 8. pemanfaatan ruang wilayah desa; dan 9. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kalurahan. 10. Wewenang Pemerintahan Kalurahan dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kalurahan meliputi: 11. penetapan kawasan strategis kalurahan; 12. perencanaan tata ruang kawasan strategis kalurahan; 13. pemanfaatan ruang kawasan strategis kalurahan; dan 14. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kalurahan. 15. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah kalurahan melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. 16. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintahan Kalurahan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang 17. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintahan Kalurahan : 18. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 19. rencana umum zonasi BWP (bagian wilayah perencanaan) dan rencana rinci tata ruang / rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kalurahan; 20. arahan peraturan zonasi kalurahan yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah desa; dan 21. pedoman bidang penataan ruang; 22. membuat system informasi penataan ruang kalurahan 23. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.   BAB VI  PENGATURAN TATA RUANG  Pasal 8  (1) Pola Ruang Kalurahan Karangwuni meliputi :  a. Kawasan Budidaya meliputi :  Rencana pola ruang zona budidaya dalam penataan ruang kalurahan adalah adanya zona yang dipertahankan dengan kebutuhan pengembangan zona sehingga terdapat konversi lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun.  1. Zona Perumahan  a. Permukiman Karangwuni Utara  b. Permukiman Karangwuni Selatan  c. Permukiman Perumahan Nelayan  2. Zona Perkantoran  3. Zona Fasilitas Umum  a. Fasilitas Pendidikan  b. Fasilitas Kesehatan  c. Fasilitas Keagamaan  d. Fasilitas Perekonomian  e. Fasilitas Pertanian  4. Zona Pertanian.  a. Sawah Lembaran/Ngisoran  1. P3A Suka Makmur Blok A, B, C D  2. P3A Suka Maju Blok A, B, C,  b. Sawah Surjan/nDuwuran  c. Tegalan  d. Lahan PT. JMI  e. Pekaranganan/Tanaman Bawah Naungan  5. Zona Budidaya Perikanan  6. Zona Perkebunan  7. Zona Peternakan  8. Zona Kehutanan    b. Kawasan Lindung meliputi :  Rencana Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasaan Lindung di Karangwuni merupakan kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana.  Kawasan Lindung Setempat di Kalurahan Karangwuni meliputi :  1. Sempadan Pantai  2. Sempadan Sungai  3. Sempadan Irigasi  4. Sempadan Jalan  Sedangkan Kawasan Rawan Bencana di wilayah Kalurahan Karangwuni mencakup :  1. Kawasan Rawan Bencana Tsunami  2. Kawasan Rawan Bencana Banjir  3. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi  4. Kawasan Rawan Bencana Angin Kencang.  (2) Struktur Ruang Kalurahan Karangwuni meliputi :  Rencana jaringan prasarana terdiri atas:  Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan;  Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan;  Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi;  Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum;  Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan;  Rencana Pengembangan Jaringan Drainase;  Rencana Pengembangan Jaringan air Limbah;dan  Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.  Pasal 9  Kawasan Strategis Desa merupakan kawasan yang dapat dikembangkan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan fungsi dan daya dukung lingkungan. Kawasan Strategis di wilayah Kalurahan Karangwuni mencakup kawasan :  1. Sepanjang jalan Sogan-Karangwuni  2. Sepanjang jalan HW Deandels  3. Pelabuhan Tanjung Adikarto  4. Pantai Karangwuni dan Rambusuar.  5. Kolam Retensi Embung Karangwuni.  6. Taman Kalurahan Pansella Karangwuni  BAB V  Hak dan Kewajiban  Pasal 10  (1) Pemerintah Kalurahan Karangwuni berkewajiban untuk :  a. melindungi hak warga masyarakat;  b. memfasilitasi kewajiban warga masyarakat;  c. melakukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang kalurahan sesuai dengan kewenangannya;  d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan kolaborasi dengan semua para pihak;  e. mengelola data dan informasi dalam system informasi tata ruang Kalurahan Karangwuni (SI Taruni ).  f. melakukan analisa daya dukung lingkungan untuk perencanaan pembangunan secara teknis-birokratis.  (2) Pemerintah Kalurahan Karangwuni berhak untuk :  a. melakukan mediasi perselisihan pemanfaatan ruang;  b. penilaian terhadap kegiatan pemanfaatan ruang dalam dokumen AMDAL/SPPL/RKL-RPL dari pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi;  c. melakukan teguran dan peringatan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;  d. memberikan insentif dan dis-insentif serta sanksi/penalty.  Pasal 11  (1) Warga masyarakat berkewajiban untuk :  a. melakukan kegiatan pemanfataan ruang dalam Zonasi/BWP sesuai Peraturan Zonasi (matrik ITBX);  b. melakukan prosedur perijinan pemanfaatan ruang;  c. membayar Pajak Bumi dan Bangunan;  d. memelihara asset kalurahan dengan cara;  1. Tidak membuang sampah/bangkai/biomassa dan air limbah ke saluran irigasi atau drainase;  2. Tidak menanami rumput di bahu jalan permukiman atau jalan usaha Tani maupun saluran irigasi/drainase;  e.meningkatkan kualitas kesuburan lahan sawah/ pekarangan / tegalan agar sehat, indah dan produktif.  f. menjaga tanda batas bidang tanah dengan menanam tanaman tahunan minimal 1 meter dari batas;  g. mendirikan bangunan sesuai batas bidang tanahnya..  (2) Warga masyarakat berhak untuk;  a. perlindungan hak milik atas bumi dan bangunannya.  b. Fasilitasi perijinan pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan sesuai perauran yang berlaku;  c. memperoleh Informasi RTRW dan RKL-RPL;  d. menyampaikan keluhan atas dampak lingkungan.  e. mengajukan pendapat usul penataan ruang;  e. mendapat insentif atas prestasi pemanfaatan ruang.  Pasal 12    (1) Investor perorangan maupun badan hukum berkewajiban:  a. Menaati perijinan investasi dan AMDAL/SPPL/RKL-RPL;  b. Menjalankan pemberdayaan Masyarakat dengan Corporate Social Responsbility dan belanja produk/tenaga local;  c. Membayar Pajak dan Iuran;  d. Menyampaikan laporan AMDAL/SPPL/RKL-RPL.  (2) Investor perorangan maupun badan hukum berhak :  a. Keamanan atas asset dan kegiatan investasinya;  b. Bebas atas pungutan liar;  c. Mendapat layanan dari fasiiltas umum;  BAB V  PELAKSANAAN PENATAAN RUANG  Pasal 10   1. (1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: 2. rencana umum tata ruang; 3. rencana rinci tata ruang; dan 4. rencana tata bangunan dan lingkungan. 5. Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas: 6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kalurahan; 7. rencana tata ruang wilayah Padukuhan; dan 8. rencana tata ruang wilayah RW dan rencana tata ruang wilayah RT.   Pasal 11  Arahan dari pelaksanaan pemanfaatan tata ruang Kalurahan Karangwuni terdiri atas :  a. perwujudan rencana kawasan pertanian organik terpadu dan berkelanjutan;  b. perwujudan rencana jaringan prasarana desa;  c. indikasi program utama dari perwujudan pemanfaatan tata ruang wilayah kalurahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan;  d. koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan kolaborasi lintas pelaku antar para pihak dalam program pemanfaatan tata wilayah kalurahan.  BAB VII  PEMBINAAN  Pasal 12  Dalam hal pembinaan tata-ruang, Pemerintah Kalurahan bertugas dan berwenang:  a. memberikan konsultasi, informasi dan edukasi terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terutama bagi warga desa yang akan melakukan alih fungsi lahan pertanian dengan berkoordinasi bersama dinas terkait;  b. fasilitasi kemudahan perijinan;  c. melakukan penilaian AMDAL untuk melindungi hak warga  d. memberikan insentif dan dis-insentif;  e. penguatan peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam pemanfaatan ruang.  f. membentuk kelompok masyarakat peduli tata ruang dan Lingkungan Hidup.  BAB VIII  PENGAWASAN  Pemerintah Kalurahan Karangwuni bersama dengan Warga masyarakat perorangan maupun kelompok masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan penataan ruang dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring evaluasi secara lisan, tulisan, audio-visual, feedbacks melalui medsos maupun SI Taruni.  Pasal  BAB VIII  PERAN MASYARAKAT, LEMBAGA DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA  Pasal 13  (1) Setiap warga masyarakat yang akan melakukan kegiatan investasi memberitahukan dan berkonsultasi kepada pemerintah desa untuk memastikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/KKPR.  (2) Kelembangaan desa berperan dalam rangka mendukung keberlangsungan pelaksanaan peraturan desa ini.  (3) Kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  a. RT; b. RW; c. Jaga Warga; d. TP-PKK; e. Karang Taruna; f. Posyandu; g. LPMK; dan g. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.  (4) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g terdiri atas: a. Kelompok Nelayan; b. Kelompok Peternak; c. Kelompok Budidaya Perikanan; d. Kelompok Tani; e. Kelompok Tani Hutan; f. Kelompok Wanita Tani; g. Kelompok Generasi Muda Tani; h. Gabungan Kelompok Tani. i. Kelompok Seni-Budaya; j. Kelompok Informasi Masyarakat; k. Kelompok Keluarga Sadar Hukum; l. Kelompok Sadar Wisata; m. P3A; n. Kelompok Masyarakat Peduli Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.  (5) Badan Usaha Milik Desa berperan dalam rangka mendukung keberlangsungan pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.  BAB IX  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 19  Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa…………… |

Ditetapkan di : Karangwuni

Pada tanggal : …………………..

LURAH KARANGWUNI

( ANWAR MUSADAD )

Diundangkan di Kalurahan Karangwuni

Pada tanggal : …………………… 2015

CARIK KALURAHAN KARANGWUNI

DWI RETNO WIDATI, AMd

LEMBARAN DESA ....................... TAHUN 2023 NOMOR ………